

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan perikanan dan peternakan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang secara umum turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat Purwakarta. Pembangunan perikanan dan peternakan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan dicapai melalui peningkatan penyediaan produksi pangan hewani, pengembangan usaha perikanan dan peternakan, pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan dan peternakan. Sehingga fokus pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Purwakarta diarahkan kepada ; ketahanan pangan, peningkatan pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Pembangunan perikanan dan peternakan yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta tertuang dalam dokumen perencanaan, yaitu RPJMD, RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagai salah satu tahapan mewujudkan perencanaan Pembangunan Jangka

Panjang Kabupaten Purwakarta untuk mewujudkan **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis atas dokumen RPJP 2005-2025 Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Konteks perencanaan pembangunan secara umum masih banyak hal yang menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan secara lebih baik, diantaranya masih terdapatnya kinerja perencanaan pembangunan yang masih menunjukkan kinerja menurun dan perlu peningkatan kinerja secara lebih baik ke depan..

Terbitnya Permendagri 90/2019 membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan terutama untuk penyusunan RKPD tahun 2021, yang selain harus mempedomani program/kegiatan sesuai RPJMD sebelumnya, namun juga harus sudah mengakomodir kegiatan/sub kegiatan sesuai Permendagri 90/2019, selain itu guna menjembatani antara program/kegiatan dan kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perencanaan tahun 2021 lalu, maka harus dilakukan pemetaan untuk mengetahui kegiatan/sub kegiatan mana yang akan dimasukkan dalam dokumen Renja maupun RKPD tahun 2021. Selain itu terjadinya Pandemi *Covid-19* tidak bisa dipungkiri perlu upaya penyesuaian RPJMD Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta Pidato Kenegaraan Presiden RI, sebagai berikut ;

1. Perubahan rumusan program
2. Menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini
3. Melakukan *Re-alokasi* anggaran
4. Menerbitkan, menata dan memformulasi regulasi baru
5. Mensinergikan organisasi yang ada

6. Reformasi fundamental di sektor kesehatan (pencegahan penyakit, PHBS, penguatan SDM, pelayanan kesehatan, dan Alat Kesehatan)
7. Ketahanan pangan (lumbung pangan, rantai pasokan dan distribusi)
8. Penguatan koperasi, metode korporasi petani, peningkatan nilai tambah petani  
Perluasan kesempatan kerja yang berkualitas

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dihipotesiskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta perlu adanya penyesuaian, baik program dan kegiatan dengan melakukan reformulasi target kinerja Pemerintah Daerah Purwakarta akibat dampak pandemi Covid-19, dengan menetapkan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus pembangunan paska pandemi *Covid-19* serta meningkatkan ketahanan pangan.

Terkait dengan latar belakang tersebut di atas, serta dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta, maka keberadaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sesuai tugas dan fungsinya perlu menempatkan perannya dalam mewujudkan dan melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Untuk itu perlu disusun dokumen rencana kerja operasional, berupa Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan selama 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2018 sampai dengan 2023, yang juga merupakan penjabaran dalam pelaksanaan arah kebijakan perekonomian dan sumber daya alam dengan berpedoman pada RPJP Daerah maupun RPJM Daerah, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dengan sistematika sebagaimana tersebut Pasal 111 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 23 Than 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah :

- Menentukan arah pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Purwakarta bagi para pelaku pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah
- Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2018 - 2023 ini adalah :

- Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari Revisi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
- Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja PD

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

## 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel matrik.

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali ifaktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.



## BAB IV. TUJUAN dan SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

## BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26.

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27

## BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

## BAB VIII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 176 Tahun 2016, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan
- 4) Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang peternakan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan & pelapor, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi ;

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas
- b. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas
- c. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian

- d. Pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan Kearsipan
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Perikanan Tangkap.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan , pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap
- b. Pelaksanaan urusan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap
- c. Pelaksanaan pembinaan tugas dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **3. Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah bidang perikanan budidaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan budidaya
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya yang meliputi kelembagaan usaha perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta produksi perikanan budidaya

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kelapa Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Peternakan**

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pembinaan perbibitan, sarana, prasarana dan pakan ternak, serta bina usaha peternakan

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Peternakan mempunyai fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pembinaan perbibitan, sarana, prasarana, dan pakan ternak, serta bina usaha peternakan.

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan, pembinaan perbibitan, sarana, prasarana, dan pakan ternak, serta bina usaha peternakan.

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan, pembinaan perbibitan, sarana, prasarana, dan pakan ternak, serta bina usaha peternakan, dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kelapa Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

b. Pengolahan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

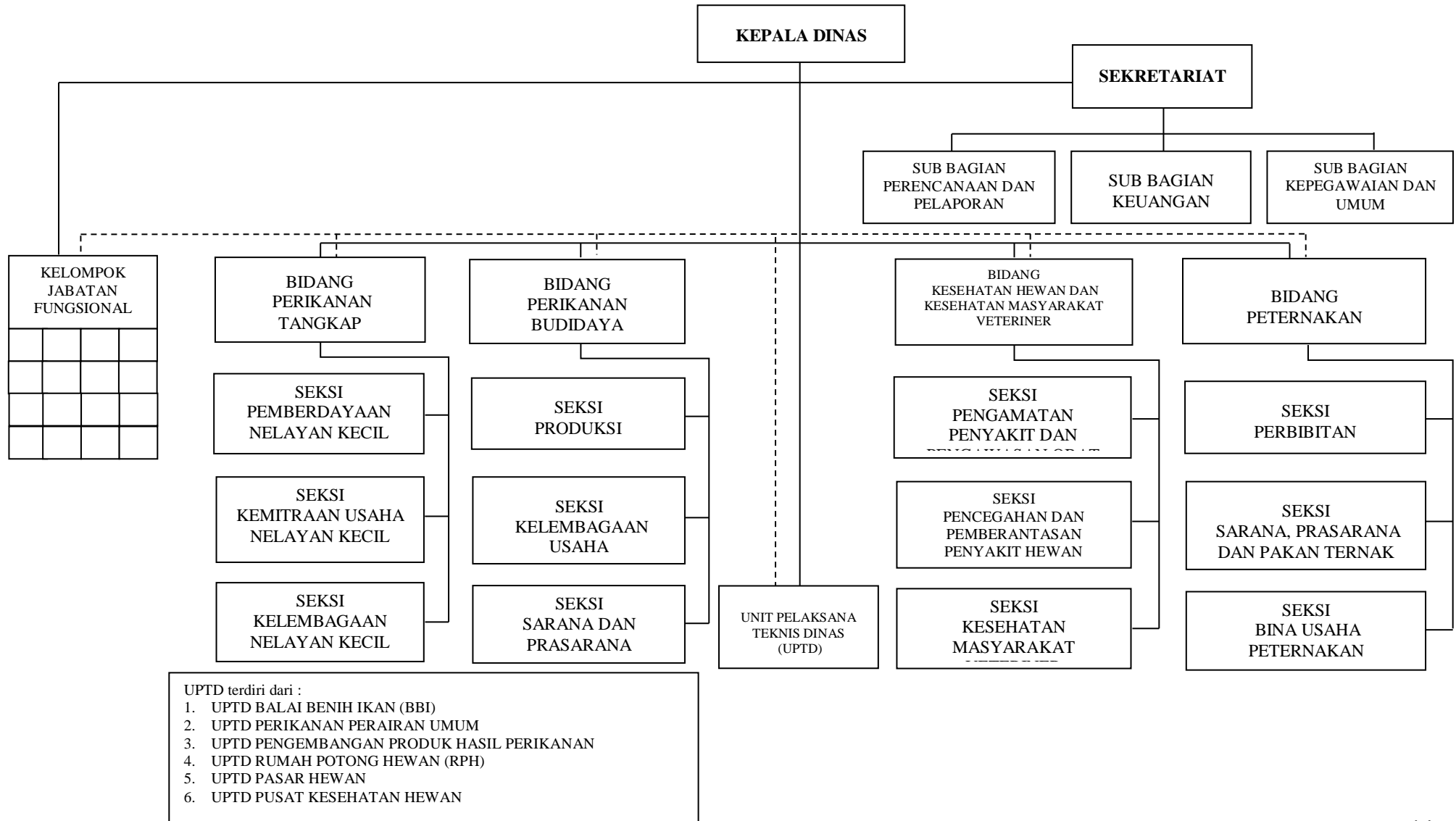
c. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **b. Struktur Organisasi**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 seperti dibawah ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**



## 2.2. Sumberdaya Dinas Perikanan dan Peternakan

### a. Sumberdaya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2019 sebanyak 66 orang. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan jenis kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jenis Kepegawaian

Pendidikan	Jml	Golongan	Jml	Jenis Kepegawaian	Jml
SD/Sederajat	1	Golongan I	2	PNS Struktural	63
SMP/Sederajat	2	Golongan II	14	PNS Fungsional	3
SMA/Sederajat	23	Golongan III	43		
Diploma III	5	Golongan IV	7		
S-1	24				
S-2	11				
JUMLAH	66		66		66

Tabel 2. Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas dan PTT (Non PNS)

Status Kepegawaian	Pendidikan					Jml
	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
Pengadministrasi pada Sub. Bag. Keuangan			1			1
Pengadministrasi pada UPTD Perikanan Perairan Umum			1			1
Pengawas Hyiene Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1					1
Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1				2
Pengambil Sampel				1		1
Pengawas Mutu Bibit Ternak	2	1	1			4
Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha			1			1
Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Ikan			1			1
Pengadministrasi Umum	1	1				2
Penyusun Pembinaan dan Pola Pengadaan Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan	1					1

Status Kepegawaian	Pendidikan					Jml
	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
Petugas Pengadministrasi Keuangan	2	1				3
Pengelola Rumah Potong Hewan			1			1
Pengelola UPTD Pasar Hewan			1			1
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1		1			2
Pengelola Pengawasan Pembudidaya Ikan		1				1
Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Ikan	1					1
Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	1					1
Tenaga Piket Malam			11			11
Tenaga Kebersihan Kantor dan UPTD			8			8
JUMLAH						44

**b. Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perikanan dan Peternakan didukung sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu sebagai berikut ;

1. UPTD. Balai Benih Ikan (BBI)
2. UPTD. Perikanan Perairan Umum
3. UPTD. Pengembangan Produk Hasil Perikanan
4. UPTD. Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
5. UPTD. Pasar Hewan
6. UPTD. Pusat Kesehatan Hewan

Sarana dan prasarana yang menjadi kekayaan/asset Dinas Perikanan dan Peternakan, dikelompokkan sebagai berikut ; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Secara rinci *data asset* dapat dilihat pada *Lampiran 1*.



### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan**

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel T-C.23. Pada periode Renstra Tahun 2018 - 2023 capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan menunjukkan bahwa ;

- Perkembangan populasi ternak dari 10 jenis ternak hampir semua jenis ternak mencapai target bahkan melebihi target, yaitu populasi sapi potong, kuda, kerbau, domba, kambing, ayam buras, ayam ras petelur dan itik. Hal ini disebabkan adanya program baik daerah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menunjang peningkatan populasi ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) seperti UPSUS SIWAB dan Program Inseminasi Buatan di Kabupten Purwakarta
- Produksi daging, telur kecuali susu pada akhir periode renstra mencapai target, hal ini disebabkan adanya peningkatan populasi ternak penghasil daging (sapi, kerbau dan ayam buras).
- Konsumsi daging, telur dan ikan mencapai target kecuali susu belum mencapai target. Hal ini disebabkan penyediaan produksi susu lokal untuk konsumsi masih kurang sehingga masih mendatangkan dari luar kabupaten Purwakarta.

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta (T-C.23)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun ke -				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	-
2.	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor (%)	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	-
3.	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	-
4.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	-
5.	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan (%)	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	-
6.	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	-
7.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (ekor)	300	-	50	100	300	400	500	600	50	640	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (ekor)	200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	375.000	120	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Prosentase kecukupan Pangan Gizi Asal Ternak dan Ikan:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun ke -				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2023
	- daging (ton)	10,61	-	10,2	10,40	10,61	10,82	10,82	11,04	28,34	28,98	34,49	-	-	1,78	1,79	1,87	-	-	-
	- telur (ton)	7,17	-	6,5	6,83	7,17	7,52	7,52	7,90	14,61	16,85	24,16	-	-	1,25	1,47	2,79	-	-	-
	- susu (liter)	0,56	-	0,25	0,38	0,56	0,84	0,84	1,27	0,06	0,06	0,14	-	-	(0,76)	(0,84)	(0,89)	-	-	-
12.	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (kelompok)	121	-	115	118	-	-	-	-	176	189	121	-	-	0,53	0,60	0,40	-	-	-
13.	Produksi Benih Ikan UPR (ekor)	741.225.600	-	555.958.000	61.768.000	741.225.600	889.470.720	1.067.364.864	190.837.837	555.958.000	582.550.000	741.649.000	-	-	0,00	8,43	(1,00)	-	-	-
14.	Produksi Ikan Konsumsi (Ton)	1.899	-	84.230	1.583	1.899	2.279	2.735	3.282	84.230	93.286,7	108.661,04	-	-	0,00	57,93	27,22	-	-	-
15.	Produksi Ikan Hias (ekor)	135.360	-	117.010		135.360	162.432	194.918	233.903	117.010	95.880	53.583	-	-	0,00	#DIV/0!	(0,60)	-	-	-
16.	Produksi Benih UPTD BBI (ekor)	5.880.000	-	5.075.000	5.440.000	5.880.000	6.320.000	6.740.000	7.200.000	5.075.000	6.323.494	2.233.335	-	-	0,00	0,16	(0,62)	-	-	-
17.	Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan (orang)	9.190	-	9.190	9.635	9.190	9.190	9.190	9190	9.190	11.668	11.700	-	-	0,00	0,21	0,27	-	-	-
18.	Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi (Ha)	4	-	4	4	4	4	4	4	4	8,7	8,7	-	-	0,00	1,18	1,18	-	-	-
19.	Produksi Ikan Hasil Tangkapan (ton)	1.272	-	1.101	1.183	1.272	1.367	1.470	1.500	1.100,81	1.183,6	60,547	-	-	(0,00)	0,00	(0,95)	-	-	-
20.	Jumlah Ikan yang ditebarkan (ekor)	450.000	-	375.000	410.000	450.000	500.000	550.000	600.000	375.000	120.000	0	-	-	0,00	(0,71)	(1,00)	-	-	-
21.	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap (kelompok)	48	-	18	46	-	-	-	-	18	52	-	-	-	0,00	0,13	0,08	-	-	-
22.	Budidaya Ternak Ruminansia Besar (lokasi)	1	-	1	1	-	-	-	-	2	5	0	-	-	1,00	4,00	(1,00)	-	-	-
23.	Budidaya Ternak Ruminansia Kecil (lokasi)	1	-	1	1	-	-	-	-	1	5	0	-	-	0,00	4,00	(1,00)	-	-	-
24.	Budidaya Ternak Unggas (lokasi)	2	-	1	2	-	-	-	-	1	25	0	-	-	0,00	11,50	(1,00)	-	-	-
25.	Produksi Hasil Ternak (%)	3	-	3	3	3	3	3	3	3	7,24	15,42	-	-	0,00	1,41	4,14	-	-	-
26.	Jumlah Akseptor IB (ekor)	1.575	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	1.823	1.500	4.891	924	-	-	0,00	2,26	(0,41)	-	-	-
27.	Jumlah Paket Teknologi yang Diterapkan (Paket)	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
28.	Jumlah kelahiran Sapi Potong hasil IB dan Kawin Alam (ekor)	1.224	-	1.197	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299	1.197	1.363	601	-	-	0,00	0,14	(0,51)	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
29.	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (lokasi)	1	-	1	1	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	0,00	1,00	(1,00)	-	-	-
30.	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	100	-	94	100	105	110	115	120	94	100	100	-	-	-	0,00	0,00	(0,05)	-	-	-
31.	Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	90	-	85	90	95	100	105		1.037,15	95	-	-	-		11,20	0,06	-	-	-	
32.	Jumlah Kelompok Usaha pengolahan ikan (kelompok)	15	-	12	13	-	-	-	-	12	19	19	-	-	-	0,00	0,46	0,36	-	-	-
33.	Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (unit)	1.172	-	1.161	1.170	-	-	-	-		1.170	1.170	-	-	-	(1,00)	0,00	(0,00)	-	-	-
34.	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (orang)	650	-	615	630	-	-	-	-	615	640	647	-	-	-	0,00	0,02	(0,00)	-	-	-
35.	jumlah ternak yang diperjual belikan di Pasar Hewan (ekor)	36.817	-	34.060	34.438	-	-	-	-		67.908	30.035	-	-	-	(1,00)	0,97	(0,18)	-	-	-
36.	Keikutsertaan dalam Pameran/expo produk hasil peternakan (kegiatan)	5	-	5	5	5	5	5	5	5	3	0	-	-	-	0,00	(0,40)	(1,00)	-	-	-
37.	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan (kelompok)	97	-	95	96	97	98	99	100	95	104	104	-	-	-	0,00	0,08	0,07	-	-	-
38.	Jumlah Kelompok Peternakan yang mengikuti lomba (kelompok)	2	-	1	2	2	2	2	2	2	2	0	-	-	-	1,00	0,00	(1,00)	-	-	-
39.	Jumlah Peternak yang mengikuti magang/studi banding/kursus/pelatihan (orang)	50	-	8	50	-	-	-	-	8	45	0	-	-	-	0,00	(0,10)	(1,00)	-	-	-
40.	Jumlah kawasan Perairan Umum yang dikelola (jenis)	3	-	3	3	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
41.	kawasan perikanan budidaya yang dikelola (kec)	17	-	17	17	17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Indiator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
42.	Jumlah KJA (Petak)	4.000	-	21.000	4.000	-	-	-	-	21.000	45.073	4.000	-	-	-	0,00	10,27	0,00	-	-	-
	Produksi Ikan KJA (Ton)	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	0	91.529,63	12.000	-	-	-		6,63	0,00	-	-	-
43.	Kasus penyakit hewan menular (PHMS) (Kasus)	0	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
44.	Terjaminya Keamanan PAH/HPAH (Kecamatan)	17	-	17	17	-	-	-	-	17	17	17	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
45.	Jumlah Ternak dan hewan kesayangan yang ditangani (ekor)	408	-	389	123	-	-	-	-		766	668				(1,00)	5,23	0,64	-	-	-
46.	Jumlah Ternak Ruminansia yang diperiksa kesehatannya sebelum dipotong (ekor)	7.699	-	6.753	7.226	7.699	8.172	8.645	9.118	389	4.944	308				(0,94)	(0,32)	(0,96)	-	-	-
47.	Jumlah kelompok perikanan tangkap yang dibina	46	-	-	-	46	48	51	53	18	52	52	-	-	-				-	-	-
48.	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina	109	-	-	-	109	115	118	121	124	127	130	-	-	-				-	-	-
49.	Wilayah pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya	17	-	-	-	17	17	17	17			17	-	-	-				-	-	-
50.	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	28,76	-	-	-	28,76	28,76	28,76	28,76			28,76	-	-	-				-	-	-
51.	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (unit)	105	-	-	-	105	110	115	120			100	-	-	-				-	-	-
52.	Budidaya Ternak Ruminansia unggul (Lokasi)	2	-	-	-	2	2	2	2			0	-	-	-				-	-	-
53.	Budidaya Ternak Unggas unggul (Lokasi)	2	-	-	-	2	2	2	2			0	-	-	-				-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
54.	Jumlah pelaku usaha penyedia dan peredaran obat hewan yg dibina (Orang)	30	-	-	-	30	30	30	30	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	Jumlah produsen pakan yang dibina (Produsen)	2	-	-	-	2	2	2	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	Tersedianya RPH yang memenuhi persyaratan teknis (Unit)	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	Persentase ternak yang divaksin dari populasi wajib suntik (%)	70	-	-	-	70	70	70	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	Persentase ternak yang diobati (Non Zoonosis) dari populasi ternak	20	-	-	-	20	20	20	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	Status Bebas Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	-	-	-	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	Jumlah ternak dan hewan kesayangan yang ditangani kesehatannya (ekor)	429	-	-	-	408	429	450	473	-	-	668	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	Jumlah pemasukan dan Pengeluaran Ternak (lalu lintas ternak) (ekor)	38.195	-	-	-	36.817	38.195	39.574	40.952	-	-	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	Peningkatan penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	17	-	-	-	17	17	17	17	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	Produk hasil ternak yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Jenis)	3	-	-	-	3	3	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Indiator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2023	
65.	Jumlah peternak yang terlatih (Orang)	25	-	-	-	25	25	25	25	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	Jumlah pelaku peternak yang berpestasi (Penghargaan)	2	-	-	-	2	2	2	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Keterangan :*  
*Realisasi Tahun 2020, sampai dengan Bulan November 2020*

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta (T-C.24)

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>																	
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>																	
	- Retribusi Daerah	286.904.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000	258.414.000	202.030.000										
	- Lain-lain pendapatan daerah yang sah	36.000.000	-	-	-	-	53.145.441	-										
	- Penjualan Hasil Perikanan	-	39.690.000	39.690.000	39.690.000	39.690.000	-	39.900.000										
	- Jasa Giro	-	-	-	-	-	-	493.323										
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>																	
a.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>																	
	- Belanja Pegawai	7.687.469.789					6.891.164.946	-										
b.	<b>Belanja Langsung</b>																	
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.533.304.851					1.320.780.876	-										
	- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	625.000.000					567.132.700	-										
	- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000					99.667.000	-										
	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	55.000.000					30.160.200	-										



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Realisa si
	- Proram Peningkatan Kesejahteraan Petani	120.000.000	25.000.000	-	-	-	70.116.000	0	-	-	-	58,43	0	-	-	-		
	- Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.869.737.000	2.610.290.000	-	-	-	1.416.140.753	545.837.100	-	-	-	75,74	20,91	-	-	-		
	- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	498.150.000	315.905.500	-	-	-	442.813.150	200.363.000	-	-	-	88,89	63,42	-	-	-		
	- Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	95.000.000	240.000.000	-	-	-	62.337.500	172.065.450	-	-	-	65,62	71,69	-	-	-		
	- Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	50.000.000	50.000.000	-	-	-	47.732.000	27.965.000	-	-	-	95,96	-	-	-	-		
	- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	270.000.000	-	-	-	-	191.814.000	-	-	-	-	71,04	-	-	-	-		
	- Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Terak	775.000.000	-	-	-	-	634.507.260	-	-	-	-	81,87	-	-	-	-		
	- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	240.000.000	330.845.000	-	-	-	178.472.650	37.576.000	-	-	-	74,36	11,36	-	-	-		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan	365.000.000	-	-	-	-	310.036.000	-	-	-	-	84,94	-	-	-	-		
	- Program Peningkatan Produksi Peternakan	215.000.000	875.000.000	-	-	-	198.993.000	123.393.500	-	-	-	92,55	14,10	-	-	-		
	- Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	-	1.360.000.000	-	-	-	-	789.968.000	-	-	-	58,09	-	-	-	-		
	- Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	500.000.000	-	-	-	-	123.393.500	-	-	-	-	14,10	-	-	-		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	12.665.827.724	13.299.119.110	13.964.075.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	-	771.671.653	810.255.236	850.767.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	-	1.538.020.256	1.614.921.269	1.695.667.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	-	-	50.000.000	52.500.000	55.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Realisa si	
	- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	314.221.500	329.932.575	346.429.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	999.041.878	1.048.993.972	1.101.443.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	74.999.931	78.749.928	82.687.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	1.339.432.014	1.406.403.615	1.476.723.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Program Penyuluhan Pertanian	-	-	114.681.000	120.415.050	126.435.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-																		
	-																		

*Keterangan :*  
*Realisasi Tahun 2020, sampai dengan Bulan November 2020*

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan dan Peternakan tidak terlepas dari faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pembangunan perikanan dan peternakan serta pengembangan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan. Faktor internal merupakan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal merupakan tantangan dan peluang tetapi juga dapat menjadi hambatan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan.

### a. Tantangan

- Peningkatan jumlah penduduk dan alih fungsi lahan pertanian (mengancam ketersediaan pangan), berkurangnya lahan pertanian akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan populasi ternak dan ikan
- Anomali iklim, perubahan iklim berdampak pada kesehatan ternak dan ikan.
- Fluktuasi harga ternak dan ikan serta hasil ternak dan ikan
- Potensi dan sumberdaya perikanan dan peternakan belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan penyediaan produksi perikanan dan peternakan
- Kemampuan produksi pelaku usaha peternakan dan perikanan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal, sehingga mutu dan produktivitas ternak dan ikan belum optimal
- Lokasi atau sentra-sentra produksi ternak dan ikan tersebar dalam unit – unit usaha kecil di pedesaan seringkali menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi karena pemasaran hasil perikanan dan peternakan tidak efisien
- Masih adanya ancaman penyakit ternak dan ikan yang dapat merugikan usaha perikanan dan peternakan
- Penerapan dan pengembangan iptek mulai dari praproduksi, budidaya, pasca panen dan pemasaran belum sepenuhnya berkembang sehingga belum dapat meningkatkan efisiensi usaha

- Kemampuan, pengetahuan dan keterampilan peternak/pembudidaya ikan masih terbatas
- Rasio jumlah penyuluh dengan kelompok tani tidak ideal, dimana tenaga penyuluh perikanan dan peternakan belum memenuhi kebutuhan wilayah kerja

#### b. Peluang

- Potensi diversifikasi pangan, khususnya pangan asal ternak dan ikan
- Perikanan dan Peternakan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan dan gizi, penyediaan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan keluarga
- Potensi sumberdaya alam dan manusia belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan usaha perikanan dan peternakan di pedesaan
- Produk perikanan dan peternakan merupakan komoditas strategis dan prospektif. Permintaan pasar terhadap komoditas perikanan dan peternakan seperti daging, telur, susu dan ikan cukup tinggi. Hal ini merupakan peluang untuk mengembangkan usaha perikanan dan peternakan
- Produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah, minat dan daya tarik generasi muda yang semakin melemah merupakan tantangan sekaligus peluang untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha agribisnis perikanan dan peternakan
- Teknologi yang selalau berkembang, penguasaan teknologi yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak dan ikan terus berkembang.
- Permintaan terhadap benih ikan yang berkualitas relatif tinggi untuk memenuhi kebutuhan usaha budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Waduk Jatiluhur. Hal ini merupakan peluang untuk pengembangan usaha pembenihan ikan rakyat.
- Pendidikanda pelatihan petani ternak dan ikan

- Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Penanganan ketahanan pangan, khususnya pangan asal ternak dan ikan kedepan semakin kompleks. Hal tersebut menuntut pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan).

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dijelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam undang-undang yang dimaksudkan dengan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan di bidang perikanan dan peternakan terdiri dari beberapa hal, sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya penyediaan produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
2. Belum berkembangnya sentra perbibitan ternak pedesaan
3. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peternak dalam memanfaatkan teknologi tepat guna dan pengelolaan usaha peternakan
4. Sarana dan prasarana peternakan perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang usaha dan pemasaran produksi peternakan

5. Potensi dan sumberdaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi perikanan
6. Masih terbatasnya penyediaan benih ikan untuk memenuhi kebutuhan usaha budidaya perikanan
7. Sarana dan prasarana perikanan perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan usaha perikanan.

Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2018 - 2023 berdasarkan tupoksi dapat disusun kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
1.	Gambaran Pelayanan PD	Peningkatan Produksi daging 2%  Produksi telur 5%  Produksi susu 50%	Sasaran produksi ternak    Sasaran produksi ikan	1. Penembangan sentra pembibitan ternak di pedesaan  2. Produksi dan produktivitas ternak belum optimal  3. Penyediaan bibit/benih yang berkualitas  4. Penerapan teknologi tepat guna  5. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran peternakan dan perikanan	1. Penataan ruang untuk pengembangan peternakan dan perikanan  2. Tersedianya Balai Pembibitan/ Pembenihan yang bersertifikat  3. Penyediaan sumberdaya aparatur yang berkompetensi teknis peternakan dan perikanan	1. Potensi sumberdaya peternakan dan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal  2. Sentra pembibitan ternak dan pembenihan ikan belum berkembang  3. Penerapan teknologi belum sepenuhnya berkembang  4. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung perlu ditingkatkan  5. Terbatasnya petugas teknis dan penyuluh di lapangan/kecamatan akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat



No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
				6. Kualitas Sumberdaya Aparatur  7. Kualitas lembaga peternak/pembudidaya		6. Kemampuan, pengetahuan dan keterampilan peternak/pembudidaya masih terbatas

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan Visi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaen Purwakarta periode 2018-2023 adalah; *“MEWUJUDKAN PURWAKARTA INSTIMEWA”*. Makna atas pernyataan visi tersebut adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realistis, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila Pancasila.

Visi tersebut di atas dicapai melalui 4 misi yang meliputi 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; 2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional; 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; 4) Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

**Misi 1.** Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Misi ini bermakna peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poerbatmaba. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

**Misi 2.** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional. Misi ini bermakna pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional. Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan,

melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

**Misi 3.** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan. Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, perusahaan, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri

cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda dan suku bangsa yang beraneka ragam, juga harus mampu menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkuat jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.

**Misi 4.** Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa. Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan

dan daerah perdesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih konkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

- |                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| <b>MISI</b>     | <b>:</b> | <b>Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial</b>        |
| <b>PERTAMA</b>  |          |  |
| <b>Tujuan 1</b> | <b>:</b> | <b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya</b>    |
| Sasaran 1       | :        | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa |
| Sasaran 2       | :        | Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga  |
| Sasaran 3       | :        | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat  |

- Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**  
 Sasaran 1 : Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan  
 Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja  
 Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja

**MISI KEDUA : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional.**

**Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.**

- Sasaran 1 : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif  
 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern

**Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas**

- Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

**MISI KETIGA : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan**

**Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup**

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah  
 Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Tujuan 2 : Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan**

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

**MISI KEEMPAT : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa**

**Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat**

- Sasaran 1 : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi  
 Sasaran 2 : Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan  
 Sasaran 3 : Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif  
 Sasaran 4 : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan  
 Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perikanan dan Peternakan mengemban Misi ke 4, yaitu Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh

Berbasis Desa, dengan sasaran terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan daya saing pertanian, perikanan dan peternakan. Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan tersebut terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 6. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<b>MISI 4 :</b> Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa  Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani	Peranan dan fungsi kelembagaan tani belum berkembang.	Kualitas SDM peternak relatif masih rendah	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan
2.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Unit Pembenihan Ikan rakyat (UPR) belum berkembang dan fungsi balai benih ikan belum optimal	Produksi benih ikan untuk memenuhi kebutuhan budidaya masih rendah	Permintaan terhadap komoditi perikanan cukup tinggi
3.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kurangnya pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di perairan umum	Tingginya para pelaku usaha penangkapan ikan (over fishing) di perairan umum	Meningkatkan potensi perikanan tangkap melalui penebaran benih (restocking) ikan di perairan umum
4.	Program Pengawasan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Penertiban dan pengendalian usaha Keramba Jaring Apung (KJA) perlu ditingkatkan dalam rangka program Citarum harum	Populasi KJA sudah melampaui batas (overload) sehingga berakibat kepada penurunan kualitas air dan tingkat produksi ikan.	Budidaya KJA Waduk Jatiluhur merupakan sentra produksi komoditas unggulan perikanan
4.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sarana dan prasarana pemasaran produksi perikanan belum maksimal	Skala usaha pelaku pemasaran produksi hasil perikanan masih berskala kecil	Permintaan terhadap komoditi hasil perikanan cukup tinggi Mulai berkembangnya pusat kuliner hasil olahan ikan

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Perbaikan mutu dan produktivitas ternak belum di kembangkan secara optimal	Produksi dan produktivitas ternak masih belum optimal	Produksi peternakan merupakan komoditi yang prospektif sebagai sumber pendapatan dan penyerapan tenaga kerja
6.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Sistem informasi pasar belum berkembang	Lokasi/unit produksi peternakan tersebar	Permintaan terhadap komoditi peternakan cukup tinggi
7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Petugas serta sarana dan prasarana untuk pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner masih terbatas.	Usaha peternakan masih dilakukan dalam skala kecil dan tersebar dipelosok daerah	Masih tingginya permintaan terhadap Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan (PAH dan HPAH)
		Jumlah petugas penyuluh baik peternakan dan perikanan masih jauh memadai dibanding dengan luas wilayah	Usaha peternakan tidak terpusat , tersebar dipelosok daerah Masih rendahnya minat peternak untuk berkelompok, sehingga menyulitkan dalam penyuluhan	Komitmen penyuluh unuk terus meningkatkan pelayanan dan penyuluhan

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Komparasi terhadap capaian sasaran Renstra K/L pada tahun 2020 (s.d. Semester II) menunjukkan bahwa untuk prosentase kecukupan pangan gizi asal ternak dan ikan telah tercapai bahkan dilampaui, kecuali susu. Sama halnya dengan prosentase kecukupan pangan gizi asal ternak dan ikan, laju produksi ternak juga mencapai sasaran bahkan melampaui, kecuali laju perikanan tangkap dan budidaya. Penyediaan daging, telur dan susu pada belum mencapai target Renstra. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 (s.d Semester II) dapat dilihat pada Tabel 6.



Tabel 7. Perbandingan Target terhadap Realisasi Renstra (s.d. Triwulan II) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Target	Realiasi
1.	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100
2.	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	100	100
3.	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100
4.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
5.	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100	100
6.	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100
7.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Lakip	-	-
8.	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	-	-
9.	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan	ekor	300	0
10.	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan	ekor	200.000	0
11.	Prosentase kecukupan Pangan Gizi Asal Ternak dan Ikan:			
	- daging	ton	10,61	30,48
	- telur	ton	7,17	27,17
	- susu	liter	0,56	0,06
12.	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	kelompok	-	170
13.	Produksi Benih Ikan UPR	ekor	741.225.600	296.041
14.	Produksi Ikan Konsumsi	ton	1.899	53.582,48
15.	Produksi Ikan Hias	ekor	135.360	53.583
16.	Produksi Benih UPTD BBI	ekor	5.880.000	2.233.335
17.	Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan	Orang	9.190	11.700
18.	Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi	Ha	4	8,7
19.	Produksi Ikan Hasil Tangkapan	Ton	1.272	60,547
20.	Jumlah Ikan yang ditebarkan	Ekor	450.000	0
21.	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap	Kelompok	-	-
22.	Budidaya Ternak Ruminansia Besar	Lokasi	-	0
23.	Budidaya Ternak Ruminansia Kecil	Lokasi	-	0
24.	Budidaya Ternak Unggas	Lokasi	-	0
25.	Produksi Hasil Ternak	Persen	3	15,42
26.	Jumlah Akseptor IB	Ekor	1.575	924
27.	Jumlah Paket Teknologi yang Diterapkan	Paket	3	3
28.	Jumlah kelahiran Sapi Potong hasil IB dan Kawin Alam	Ekor	1.224	601
29.	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak	Lokasi	1	0
30.	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan	Unit	105	100
31.	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	90	95
32.	Jumlah Kelompok Usaha pengolahan ikan	Kelompok	-	19
33.	Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	-	1.170
34.	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Orang	-	647
35.	jumlah ternak yang diperjual belikan di Pasar Hewan	Ekor	-	30.035
36.	Keikutsertaan dalam Pameran/expo produk hasil peternakan	Kegiatan	5	0

37.	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	Kelompok	97	104
38.	Jumlah Kelompok Peternakan yang mengikuti lomba	Kelompok	2	0
39.	Jumlah Peternak yang mengikuti magang/studi banding/kursus/pelatihan (orang)	Orang	-	0
40.	Jumlah kawasan Perairan Umum yang dikelola	Jenis	-	3
41.	kawasan perikanan budidaya yang dikelola	Kecamatan	17	17
42.	Jumlah KJA	Petak	-	4.000
	Produksi Ikan KJA	Ton	-	12.000
43.	Kasus penyakit hewan menular (PHMS)	Kasus	-	0
44.	Terjaminya Keamanan PAH/HPAH	Kecamatan	-	17
45.	Jumlah Ternak dan hewan kesayangan yang ditangani	Ekor	-	668
46.	Jumlah Ternak Ruminansia yang diperiksa kesehatannya sebelum dipotong	Ekor	7.699	308
47.	Jumlah kelompok perikanan tangkap yang dibina	Kelompok	46	52
48.	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina	Kelompok	109	130
49.	Wilayah pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya	Kecamatan	17	17
50.	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/th	28,76	28,76
51.	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	105	100
52.	Budidaya Ternak Ruminansia unggul	Lokasi	2	0
53.	Budidaya Ternak Unggas unggul	Lokasi	2	0
54.	Jumlah pelaku usaha penyedia dan peredaran obat hewan yg dibina	Orang	30	0
55.	Jumlah produsen pakan yang dibina	Produsen	2	0

Sejak mulai masuknya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ke Indonesia, dan menyebar keseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Purwakarta, maka pandemi *Covid-19* ini telah memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kesehatan, perekonomian dan sosial masyarakat. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat dan para pelaku usaha agar pandemi *covid-19* tidak menyebar luas dan segera hilang.

Penanganan terhadap dampak pandemi *covid-19* dilakukan pemerintah dengan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diberbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Purwakarta, sosialisasi penggunaan masker dan jaga jarak, serta pengaturan jam kerja kantor.

Dari sisi penganggaran untuk penanganan *covid-19*, pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran dan memfokuskan target kinerja pada

penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Namun demikian beberapa pelaku usaha, bisnis dan perusahaan-perusahaan banyak yang hancur bahkan bangkrut karena tidak bisa bertahan dari sisi kemampuan keuangan selama karena tidak bisa menjalankan usahanya selama beberapa bulan akibat pandemi *covid-19*.

Dampak pandemi *covid-19* telah mempengaruhi terhadap capaian target pembangunan daerah secara nasional, termasuk capaian target Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Akan Tetapi walaupun dengan keterbatasan anggaran, Dinas Perikanan dan Peternakan terus berusaha lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perikanan dan Peternakan terus memberikan inovasi-inovasi baru yang kreatif terutama inovasi yan berakaitan dengan ternak, ikan dan bahan hasil ternak dan ikan

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pembangunan berbasis kawasan menjadi tema sentral pada saat ini, pembangunan peternakan berbasis kawasan tersebut diupayakan agar pembangunan peternakan yang selama ini bersiat parsial dapat dibangun secara holistik di dalam satu kawasan. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung, suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan harus memperhatikan optimalisasi sumberdaya lokal dan strategi kebijakan pembangunan daerah.

Lahan menjadi faktor produksi utama dalam usaha peternakan dan perikanan, karena lahan sebagai sumber tempat untuk memproduksi hasil –hasil peternakan dan perikanan. Oleh karena itu, pembentukan kawasan peternakan

dan perikanan sangat erat kaitannya dengan eksistensi dari lahan itu sendiri. Sub sektor peternakan dan perikanan menjadi bagian penting dalam rangka pengembangan kawasan pertanian. Peran yang diberikan oleh sub sektor peternakan di dalam pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah penyediaan konsumsi hewani asal ternak berupa daging, telur dan susu serta produk derivasinya. Pendekatan pembangunan peternakan diokuskan pada empat hal yaitu pendekatan pembangunan kawasan, pendekatan kesisteman (hulu sampai hilir), pendekatan kelembagaan dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan ke empat pendekatan tersebut, maka pembangunan peternakan berbasis kawasan menjadi salah satu aktor yang penting di dalam pembangunan peternakan

Budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya peternakan besar dan peternakan kecil/unggas. Sedangkan untuk pengembangan budidaya perikanan diarahkan hamper diseluruh kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Lokasi kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian pada lahan kering, maupun perkebunan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Purwakarta, rencana pengembangan jenis ternak besar potensial dilakukan di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maniis. Pengembangan kawasan budidaya ruminansi kecil dan unggas dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan, yang meliputi seluruh kecamatan di purwakarta.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu strategis yang kini sedang dihadapi yaitu adanya pandemi Covid-19 meyebabkan relatif menurunnya angka indeks pendidikan, meningkatnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka pengangguran dan berkurangnya upah pekerja serta terpuruknya sektor real khususnya pada sekunder dan tersier. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten

Purwakarta, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

#### 1. Ketersediaan Pangan Asal Ternak dan Ikan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketersediaan pangan asal ternak dan ikan adalah kondisi dimana terpenuhinya pangan asal ternak dan ikan, yang tercermin dari ketersediaan baik ternak ataupun ikan serta hasil asal ternak maupun ikan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif serta berkelanjutan. Mengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan asal ternak dan ikan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan pangan asal ternak dan ikan yang cukup, Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) secara merata di seluruh daerah Kabupaten Purwakarta sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

#### 2. Lingkungan Hidup

Produksi dan kapasitas produksi pangan asal ternak dan ikan semakin terbatas, karena:

- 1) Berlanjutnya konversi lahan peternakan dan perikanan ke penggunaan non peternakan dan perikanan ;
- 2) Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, hal ini menyebabkan lahan pangonan untuk ternak serta pakan alami ikan semakin berkurang ;
- 3) Semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air terutama pada musim kemarau untuk budidaya ikan akibat kerusakan hutan;

- 4) Tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan PD, maka isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018– 2023 adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan
2. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dan peternakan
3. Pengembangan sentra pembibitan ternak dan pembenihan ikan pedesaan
4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan ikan
5. Pelestarian komoditi ternak dan ikan potensi lokal
6. Peningkatan penerapan teknologi perikanan dan peternakan tepat guna
7. Peningkatan sarana dan prasarana agribisnis perikanan dan peternakan
8. Pengembangan kawasan usaha perikanan dan peternakan yang
9. berwawasan lingkungan
10. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan dan peternakan

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang merupakan kegiatan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, dan dengan visi Kepala Daerah terpilih yaitu "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA". Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD adalah sebagai berikut.

#### **a. Tujuan ;**

1. Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal
2. Meningkatkan penyediaan pangan hewani dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya perikanan dan peternakan
3. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan yang produktif, mandiri, berdaya saing, bernilai tambah dan ramah lingkungan
4. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat veteriner.

b. Sasaran ;

1. Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran
2. Meningkatnya penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan
3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan peternakan
4. Berkembangnya kelompok/ kelembagaan perikanan dan peternakan
5. Terkendalinya penyakit hewan menular
6. Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna
7. Berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan
8. Meningkatnya produksi kawasan budidaya perikanan
9. Berkembangnya kelompok/kelembagaan perikanan dan peternakan
10. Meningkatnya produktivitas kerja penyuluh perikanan

Dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan dan peternakan diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh, adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta adalah, *Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, serta Daya Beli Masyarakat*. Sasaran daerah yang ingin dicapai adalah, *Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan*.

Dari uraian di atas, tujuan, indikator dan target kinerja tujuan serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta disampaikan pada tabel TC-25.



Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC. 25)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan Penyediaan Pangan Hewani Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Dan Sumberdaya Perikanan Dan Peternakan	1. Meningkatnya Penyediaan Pangan Dan Gizi Asal Ternak dan Ikan	- Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (ekor)	1.000	-	-	-	-
		- Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (ekor)	120.000	-	-	-	-
		- Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu (Kegiatan)	1	-	-	-	-
		- Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (Ekor)	-	300	-	-	-
		- Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (Ekor)	-	200.000	-	-	-
		- Penyediaan Daging, Telur dan Susu Perbaikan Gizi Masyarakat :					
		Daging (Ton)	-	2	-	-	-
		Telur (Ton)	-	5	-	-	-
		Susu (Liter)	-	1.100	-	-	-
2. Meningkatkan Usaha Perikanan dan Peternakan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing, Bernilai Tambah dan Ramah Lingkungan	2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Perikanan tangkap dan Peternakan	- Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (kelompok)	118	121	-	-	-
		- Produksi Benih Ikan UPR (ekor)	61.768.000	741.225,6	-	-	-
		- Produksi Ikan Konsumsi (ton)	1.583	1.899	-	-	-
		- Produksi Ikan Hias (ekor)	0	135.360	-	-	-
		- Produksi Benih UPTD BBI (ekor)	5.440.000	5.880.000	-	-	-
		- Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan (org)	9.635	9.190	-	-	-
		- Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi (Ha)	4	4	-	-	-
		- Produksi Ikan Hasil Tangkapan (Ton)	1.183,06	1.272	-	-	-
		- Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (ekor)	410.000	450.000	-	-	-
		- Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Kelompok)	46	48	-	-	-
		- Jumlah akseptor IB (ekor)	4.981	-	-	-	-
		- Jumlah Paket Teknologi yang diterapkan (paket)	3	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
		- Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Lokasi)	1	1	-	-	-
		- Budidaya Ternak Ruminansia Kecil (lokasi)	1	1	-	-	-
		- Budidaya Ternak Unggas (lokasi)	1	2	-	-	-
		- Produksi Hasil Ternak (%)	3	3	-	-	-
		- Jumlah Akseptor IB (Ekor)	1.500	1.575	-	-	-
		- Jumlah Teknologi Yang Diterapkan (paket)	3	3	-	-	-
		- Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (Ekor)	1.200	1.224	-	-	-
		- Produksi Ikan Hasil Tangkapan (ton)	-	-	1.367	1.470	1.580
		- Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking) (ekor)	-	-	500.000	550.000	600.000
		- Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina (kelompok)	-	-	51	53	56
		- Poduksi Ikan Konsumsi (Ton)	-	-	14.279	14.735	15.282
		- Produksi Benih Ikan UPR (ekor)	-	-	889.470.720	1.067.364.864	190.837.837
		- Produksi Benih Ikan BBI (ekor)	-	-	6.320.000	6.740.000	7.200.000
		- Produksi Ikan Hias (ekor)	-	-	162.432	194.918	233.903
		- Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina (kelompok)	-	-	124	127	130
		- Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi (Ha)	-	-	4	4	4
		- Produksi Hasil Ternak (persen)	-	-	2	2	2
		- Jumlah Akseptor IB (ekor)	-	-	1.704	1.704	1.788
		- Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (ekor)	-	-	1.273	1.273	1.299
		- Budidaya Ternak Ruminansia Unggul (lokasi)	-	-	2	2	2
		- Budidaya Ternak Unggas Unggul (lokasi)	-	-	2	2	2

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
		- Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) (lokasi)	-	-	1	1	1
		- Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina (orang)	-	-	30	30	30
		- Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina (produsen)	-	-	2	2	2
		- Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis (unit)	-	-	1	1	1
		- Jumlah ternak ruminansia yang diperiksa kesehatannya sebelum dipotong (ekor)	-	-	8172		
		- Terjaminnya keamanan PAH/HPAH (kecamatan)	-	-	17		
	3. Berkembangnya Kelompok/Kelembagaan Perikanan dan Peternaka	- Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	100	105	-	-	-
		- Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	85	90	-	-	-
		- Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (Kelompok)	13	14	-	-	-
		- Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (Unit)	1170	1.172	-	-	-
		- Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (org)	630	650	-	-	-
		- jumlah Ternak Yang Diperjual Belikan di Pasar Hewan (ekor)	34.438	36.817	-	-	-
		- Keikutsertaan Dalam Pameran/Expo Produk Hasil Peternakan (Keg)	5	5	-	-	-
		- Jumlah Kelompok Usaha Peternakan (kelompok)	96	97	-	-	-
		- Jumlah Kelompok Peternakan Yang Mengikuti Lomba (Kelompok)	2	2	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2019	2020	2021	2022	2023	
		- Jumlah Peternak Yang Mengikuti Magang/Studi Banding/Kursus/Pelatihan (Orang)	50	50	-	-	-	
		- Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	-	-	28,76	28,76	28,76	
		- Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	-	-	95	100	105	
		- Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (klmpk)	-	-	15	16	17	
		- Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (unit)	-	-	110	115	120	
	4. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Budidaya dan Perairan Umum	- Jumlah Kawasan Perairan Umum Yang Dikelola (Jenis)	3	3	-	-	-	
		- Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang Dikelola (Kecamatan) <sup>1</sup>	17	17	-	-	-	
		- Jumlah KJA (Petak)	4.000	4.000	-	-	-	
		- Produksi Ikan KJA (Ton)	12.000	12.000	-	-	-	
		- Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya (Kecamatan)	-	-	17	17	17	
	3. Menciptakan Kondisi Yang Kondusif Bagi Ketentraman Dan Kenyamanan Masyarakat Veteriner	5. Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) serta Kesmavet	- Persentase ternak yang diobati (%)	80	-	-	-	-
			- Presentase populasi ternak yang diobati (%)	20	-	-	-	-
- Sarana kesehatan hewan (Paket)			1	-	-	-	-	
- Kasus penyakit hewan menular (PHMS)(kasus)			0	0	-	-	-	
- Terjaminnya keamanan PAH/HPAH (kec)			17	17	-	-	-	
- Jumlah ternak dan hewan kesayangan yang ditangani (ekor)			123	408	-	-	-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
		- Jumlah ternak ruminansia yang diperiksa sebeforem dipotong (ekor)	7.226	7.699	-	-	-
		- Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik (persen)	-	-	70	70	70
		- Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) (kasus)	-	-	0	0	0
		- Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan (Kecamatan)	-	-	17	17	17
		- Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) (ekor)	-	-	429	450	473
		- Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) (kecamatan)	-	-	17	17	17
		- Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) :					
		Daging	-	-	2	2	2
		Telur	-	-	5	5	5
		Susu	-	-	1.100	1.100	1.100

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dalam mensukseskan Visi dan Misi Bupati Purwakarta mengarahkan upaya perbaikan secara terus menerus pada semua kegiatan, melalui keterlibatann semua aparatur untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat perikanan dan peternakan Kabupaten Purwakarta. Adapun stretegi dan kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada table 9.

Tabel 9. Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan

<b>VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA INSTIMEWA</b>			
<b>MISI 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.	1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran	Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern		
<b>MISI 4 : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa</b>			
1. Meningkatkan penyediaan pangan asal hewan dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya perikanan dan peternakan	1. Meningkatkan penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan hewani dengan penyebaran dan pengembangan ikan dan ternak kepada masyarakat	1. Meningkatkan populasi, produksi dan konsumsi hasil perikanan dan peternakan
2. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan yang produktif, mandiri, berdaya saing, bernilai tambah dan ramah lingkungan	1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan peternakan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas benih ikan	1. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan
		2. Meningkatkan sarana perikanan tangkap dan restocking di perairan umum	2. Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap dengan menerapkan <i>Culture Base Fisheries</i>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3. Meningkatkan kualitas mutu bibit dan produktivitas ternak	3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) melalui pengembangan wilayah sumber bibit dan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB), serta penerapan teknologi peternakan melalui Inseminasi Buatan dan Embrio Transfer
	2. Meningkatnya pengelolaan kawasan budidaya ikan di perairan umum	1. Mengelola kawasan budidaya dan perairan umum	1. Pengembangan kawasan budidaya dan perairan umum yang ramah lingkungan
	3. Mengembangkan skala usaha kelompok/ kelembagaan perikanan dan peternakan	1. Membina usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan	1. Peningkatan produk pengolahan hasil perikanan dan peternakan dan penguatan daya saing produk perikanan dan peternakan
			2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			3. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran hasil peternakan
			4. Pengembangan SDM dan Kelembagaan perikanan dan peternakan yang berwawasan agribisnis
3. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat veteriner	1. Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan <i>zoonosis</i> (PHMSZ)	1. Pencegahan, penanggulangan pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan Strategis dan <i>Zoonosis</i> (PHMSZ), penanggulangan Gangguan Reproduksi (Ganrep) pada ternak serta menjamin keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan, Peningkatan status kesehatan hewan (Keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet), Pengawasan lalulintas ternak, pengamatan penyakit hewan dan surveilance, pengawasan peredaran obat hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan mewujudkan keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)

## **BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1. Rencana Program Perangkat Daerah**

Program pembangunan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, diarahkan kepada peningkatan penyediaan pangan dan gizi masyarakat, pengembangan usaha dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Perikanan dan Peternakan. Program Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta berdasarkan kewenangan dan urusan SKPD adalah sebagai berikut ;

#### **a. Program pada Dinas Perikanan dan Peternakan;**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### **b. Program Urusan Wajib ;**

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

#### **c. Program Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan);**

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
4. Program Peningkatan Produksi Peternakan
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak

#### **d. Program Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan ;**

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar



### **5.1. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja pembangunan Perikanan dan Peternakan tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 10.

### **5.2. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Purwakarta adalah ;

#### **1. Sasaran lokasi/lahan**

Lahan sebagai basis ekologis perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk kegiatan budidaya Perikanan dan Peternakan. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Purwakarta, peruntukan lahan kawasan budidaya peternakan seluas 625 ha dan kawasan budidaya perikanan seluas 8.192 ha.

#### **2. Sasaran peternak/pembudidaya ikan/nelayan**

Peternak dan pembudidaya ikan/nelayan sebagai pelaku pembangunan perikanan dan peternakan harus diberdayakan dan ditingkatkan pendapatannya melalui usaha perikanan dan peternakan. Para pelaku pembangunan Perikanan dan Peternakan ini diarahkan kepada terbentuknya kelompok – kelompok usaha/lembaga tani agar mudah dibina dan ditingkatkan kualitasnya. Pada tahun 2020 tercatat ada 160 kelompok tani ternak dan ikan.

Tabel 10. Jumlah Kelompok Tani Ternak dan Ikan

No.	Kelompok	Tahun 2020 (Semester I)
1.	Kelompok pembudidaya ikan (kelompok)	118
2.	Pelaku usaha pembudidaya ikan (orang)	11.700
3.	Kelompok perikanan tangkap	52
4.	Kelompok usaha pengolahan ikan (kelompok)	19
5.	Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang)	647
6.	Kelompok usaha peternakan	104

### 3. Sasaran Komoditi Ternak/Ikan

Ternak dan ikan sebagai obyek pembangunan Perikanan dan Peternakan perlu ditingkatkan produksi dan produktivitasnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengelolanya. Potensi populasi dan produksi ternak dan ikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Potensi Populasi dan Produksi Ternak dan Ikan

No.	Potensi	Tahun 2020 (Semester I)
<b>A.</b>	<b>POPULASI TERNAK (ekor) :</b>	
1.	Sapi Potong	15.409
2.	Sapi Perah	0
3.	Kerbau	15.320
4.	Kambing	400.659
5.	Domba	7.63.271
6.	Kuda	126
7.	Ayam Buras	932.861
8.	Ayam Ras Pedaging	5.750.672
9.	Ayam Ras Petelur	338.152
10.	I t i k	1.717.744
<b>B.</b>	<b>PRODUKSI TERNAK (kg)</b>	
1.	Daging	30.957.849
2.	Telur	27.460.535
3.	Susu	80.000
<b>C.</b>	<b>PRODUKSI IKAN (ton)</b>	<b>53.582,48</b>

### 4. Sasaran Teknologi

Teknologi tepat guna perlu dikembangkan dan diterapkan sebagai alat untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Pengembangan teknologi diarahkan

kepada teknologi budidaya, Inseminasi Buatan (IB), pakan, pengendalian penyakit dan pasca panen. Tahun 2020 sampai dengan semester I tercatat akseptor IB sebanyak 924 ekor dengan kelahiran hasil IB dan kawin alam pada sapi potong sebanyak 601 ekor. Untuk perikanan pengembangan teknologi terus dikembangkan salah satunya adalah budidaya ikan dalam ember (BUDIKDAMBER), yang pada tahun 2020 telah dilaksanakan bantuan sebanyak 1.000 ember kepada 200 orang penerima.

### **5.3. Pendanaan Indikatif**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan perikanan dan peternakan diperlukan dukungan pendanaan atau anggaran untuk membiaya berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2018 – 2023. Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun dari sumber lainnya. Rencana pendanaan indikatif Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)										Target Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Dukungan manajemen administrasi perkantoran Dinas Perikanan dan Peternakan	Persentase pegawai yang memiliki keseuaian kompetensi	76,29%	100	3.857.000.000	100	4.000.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan	Tersebar
				Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasaran kantor	76,29%	100		100		100		100		100		100			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	100		100		100		100		100		100			
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	81,59%	100		100		100		100		100		100			
				Peresentase pemencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan	100%	100		100		100		100		100		100			
				Persentase ketersediaan data dan kinerja OPD	100%	100		100		100		100		100		100			
Meningkatnya penyediaan pangan hewani dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumberdaya perikanan dan peternakan	Meningkatnya penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan	Persentase kecukupan pangan gizi asal ternak dan ikan	Program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan hewani	Jumlah ternak unggas yang di sebarakan	50	100	365.000.000	300	401.500.000	400	441.650.000	500	485.815.000	600	534.396.500	190	600.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan yang produktif, mandiri, berdaya saing, bernilai tambah dan ramah lingkungan	1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan peternakan	Daging (2%) Telur (5%) Susu (50%) Ikan (2%) Laju Produksi Perikanan Laju produksi Ternak Laju Populasi Ternak	Program pengembangan budidaya perikanan	Penyediaan daging, telur dan susu perbaikan gizi masyarakat																			
				Daging	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton		
				Telur	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	5 ton	
				Susu	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
				Ikan	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
				Jumlah kelompok pembudidaya ikan	115	118	1.819.737.000,00	121	2.001.110.000,00	124	2.201.881.770.000	127	2.422.069.947,00	130	2.664.276.941,70	150	2.664.276.941,70	150	2.664.276.941,70	150	2.664.276.941,70	150	2.664.276.941,70
				Produksi benih ikan UPR (ekor)	555.958.000	61.768.000		741.225.600		889.470.720		1.067.364.864		190.837.837		190.837.837		2.864.276.941,00		2.864.276.941,00		2.864.276.941,00	
				Produksi ikan konsumsi (ton)	94.230	1.583		1.899		2.279		2.735		3.282		3.282							
				Produksi ikan hias (ekor)	117.010	0		135.360		162.432		194.918		233.903		233.903							
				Produksi benih UPTD BBI (ekor)	5.075.000	5.440.000		5.440.000		6.320.000		6.740.000		7.200.000		7.200.000							
Jumlah pelaku usaha budidaya ikan (orang)	9.190	9.635		9.190		9.190		9.190		9.190		9.190		9.190		9.190		9.190					
Luas lahan budidaya yang di sertifikasi	4	4		4		4		4		4		4		4		4		4					
Jumlah benih ikan yang di sebarakan	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000					
Produksi ikan hasil tangkapan (ton)	1.101	1.183		1.272		1.367		1.470		1.580		1.580											
Jumlah ikan yang di tebarakan (ekor)	375.000	400.000		498.150.000		547.965.000		500.000		602.761.500		550.000		663.037.650		600.000		729.341.415					
Jumlah kelompok usaha perikanan tangkap	18	46		48		51		53		5		5		5		5		5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program peningkatan produksi peternakan	Budidaya ternak ruminasia besar (lokal)	1	1	1470.000.000	1	564.000.000	1	676.800.000	1	812.160.000	1	974.592.000				
				Budidaya ternak ruminansia kecil (lokal)	1	1		1		1		1		1					
				Budidaya ternak unggas lokal	1	1		2		2		2		2					
				Produksi hasil ternak (%)	3	3		3		3		3		3					
				Jumlah Akseptor IB (ekor)	1500	1500		1575		1654		1736		1823					
				Jumlah paket teknologi yang di terapkan (paket)	3	3		3		3		3		3					
				Jumlah kelahiran sapi potong hasil IB dan kawin alam (ekor)	1197	1200		1224		1248		1273		1299					
				Pengembangan hijauan pakan ternak (lokasi)	1	1		1		1		1		1					
	2. Berkembangnya kelompok kelembagaan perikanan dan peternakan	Laju aktivitas usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah unit Pengolahan hasil Perikanan (Unit )	94	100	95.000.000	105	114.000.000	110	136.800.000	115	164.160.000	120	196.962.000				
				Produksi olahan produk perikanan (ton)		85		90		95		100		105					
				Jumlah kelompok usaha pengolahan ikan (kelompok)	12	13		14		15		16		17					
				Jumlah unit pemasaran hasil perikanan (unit)	1161	1170		1172		1174		1176		1178					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha pemasaran produksi hasil peternakan	Program peningkatan pemasaran hasil peternakan	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (orang)	615	630	165.000.000	660	247.500.000	670	272.250.000	685	299.475.000	100	329.422.500				
				Jumlah ternak yang di perjual belikan di pasar hewan (ekor)	34.060	34.438		36817		38195		39474		40952					
				keikutsertaan dalam pameran/expo produk hasil peternakan ( kegiatan )	6	5		5		5		5		5					
		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani pelaku agribisnis	Program pengngatan kesejahteraan peternak	Jum:ah kelompok Usaha Peternaan (Kelompok)	95	96	120.000.000	97	144.000.000	98	172.800.000	99	207.360.000	100	248.832.000				
				Jumah kelompok yang mengikuti lomba (kelompok)	1	2		2		2		2		2					
				Jumlah peternak yang megikuti studi banding/kursus/ pelatihan (orang)	8	50		50		50		50		50					
	3.																		
	4.	Meningkatnya pengelolaan kawasan budidaya dan perairan umum	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah kawasan perairan umum yang di kelola (jenis)	3	3	50.000.000	3	75.000.000	3	112.500.000	3	168.750.000	3	253.125.000				
				Kawasan perikanan budidaya yang di kelola (Kec	17	17		17		17		17		17					
		Laju produksi ikan KJA		Jumlah KJA (petak)	21.000	4000		4000		4000		4000		4000					
				Produksi ikan KJA		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat veteriner	Terkendalinya penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Kesmavet	Penyediaan PAH/HPAH (Produk Asal Hewan / Hasil Pangan Asal Hewan ) yang ASUH	Program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Kasus penyakit hewan menular (PHMS)	0 kasus	0 kasus	750.000.000	0 kasus	3.000.000.000	0 kasus	3.6000.000.000	0 kasus	4.320.000.000	0 kasus	5.184.000.000				
		Status kesehatan hewan bebas penyalit menular		Terjaminnya keamanan PAH/HPAH (kecamatan)	17	17		17		17		17		17					
				Jumlah ternak dan hewan kesayangan yang di tangani (ekor)	117	389		123		428.87		450.32		472,83					
				Jumlah ternak ruminasia yang di periksa kesehatannya sebelum di potong (ekor)	6.753	7.226		7.699		8.172		8.645		9.118					



## **BAB VII. PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah juga merupakan penerjemahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Masa Bakti 2018- 2023.

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun sebagai kerangka acuan, pedoman dan arah pembangunan Perikanan dan Peternakan selama 5 (lima) tahun ke depan. RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam Renja Perangkat Daerah harus berhubungan dan terkait dengan RENSTRA. Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategi (RENSTRA) Perubahan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat membantu Kepala Perangkat Daerah untuk mengevaluasi sejauhmana tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan yang tertuang dalam RENSTRA.

Dengan adanya RENSTRA Perangkat Daerah diharapkan prioritas pembangunan dapat lebih terarah, terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, sehingga tujuan pembangunan Perikanan dan Peternakan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

## KATA PENGANTAR

Rencana strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta 2018-2023 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (RPJMD), serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan perikanan dan peternakan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.

Secara operasional akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode I (satu) tahun, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Purwakarta. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan melalui berbagai kajian dan telaahan telah berhasil merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023, yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi serta berfungsi menjabarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Dengan demikian RENSTRA ini merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah-langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan yang dilakukan khususnya sampai tahun 2023.

Atas kerjasama semua pihak terkait, yang melibatkan unsur pimpinan, pejabat dan staf yang mampu memberikan masukan dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, maka tersusunlah Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Dengan demikian diharapkan RENSTRA ini dapat merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah-langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan yang dilakukan khususnya hingga tahun 2023.

Akhirnya disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

KEPALA DINAS  
PERIKANAN DAN PETERNAKAN



Ir. BUDHI SUPRIYADI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620908 199003 1 009

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.4 Maksud dan Tujuan .....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.....	15
2.3. Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	28
<b>III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	43
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	44
<b>IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	47
<b>V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	51
<b>VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	53
5.1 Indikator Kinerja.....	53
5.2. npok Sasaran.....	54
5.3. anaan Indikatif.....	56
<b>VII PENUTUP</b> .....	62
 <b>LAMPIRAN</b>	 63

## DAFTAR TABEL

No	Tabel	Hal
1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jenis Kepegawaian.....	15
2	Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas dan PTT (Non PNS).....	15
3	Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta (T-C.23).....	18
4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta (T-C.24).....	24
5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan.....	32
6	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
7	Perbandingan Target terhadap Realisasi Renstra (s.d. Triwulan II) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.	41
8	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Peternakan.....	48
9	Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan.....	51
10	Jumlah Kelompok Tani Ternak dan Ikan.....	55
11	Potensi Populasi dan Produksi Ternak dan Ikan.....	55
12	Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.....	57



Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Purwakarta



**RENSTRA**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**(PERUBAHAN)**  
**2018 - 2023**